



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR**

MAKASSAR

Telp : -
Hotline :

Fax : -
Email : -

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR : SL010.IDMAK.1123.000139

Berdasarkan : Surat Permohonan **PT. ALIDA PUTERA SAMUDERA**, Nomor : **SPD.L.IDMAK.2311.000141**, Tanggal **16 Nov 2023**,
Perihal **MUAT** barang berbahaya di : **MAKASSAR**

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan **PT. ALIDA PUTERA SAMUDERA**, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---|
| - Nama Kapal | : RAUS 1 |
| - Bendera/Call Sign | : ID / YDFI2 |
| - Ukuran Kapal | : 585 |
| - Jumlah ABK | : 10 |
| - Pemilik/pencharter Kapal | : PT. RIDIA AKUSA UTAMA SHIPPING / PT.ALIDA PUTERA SAMUDERA |
| - Agen Kapal | : PT. ALIDA PUTERA SAMUDERA |
| - Pelabuhan Asal | : MAKASSAR |
| - Pengirim kargo (shipper) | : PT. PERTAMINA |
| - Penerima kargo (consignee) | : PT.ALIDA PUTERA SAMUDERA |
| - Tanggal tiba di Pelabuhan | : 16 Nov 2023 |
| - Pelabuhan Asal | : MAKASSAR |
| - Nama Kargo | : Diesel fuel |
| - Jumlah Kargo | : 140 Ton |
| - Rencana kegiatan | : MUAT |

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal RAUS 1

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan **MUAT** Barang Berbahaya **Diesel fuel / Klas 3**

Pelaksanaan kegiatan **MUAT** barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **17 Nov 2023**



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 16 NOV 2023

**A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
KEPALA BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.